



L P P D

DPPKB KOTA BANDUNG



TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2018 dapat diselesaikan. Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKB Kota Bandung Tahun 2014 dan maksud tujuan disusunnya LKIP adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;
2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat;
3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan
4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pencapaian kinerja, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2018 dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Desember 2018

Kepala DPPKB Kota Bandung

Drs. H.EDDY MARWOTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 198910 1 001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.	6
C. Tugas dan Fungsi	6
D. Isu Strategis	6
E. Landasan Hukum.....	6
F. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu.....	8
A. Rencana Strategis.....	8
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	13
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	13
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	14
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	15
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	18
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	20
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	21
BAB IV PENUTUP	31



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. Eddy Marwoto M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

D. Isu Strategis

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas DPPKB tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA”



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran
- b. Memberikan perlindungan hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
- c. Menggali potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018 sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai berikut



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Adanya perlindungan hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif	Jumlah PIK Remaja yg Aktif				75	74
		.Meningkatnya Cakupan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran				100	100
2	Meningkatnya perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran	Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif				-	365231
3	Tergalinya potensi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif				-	90

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2014-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun
2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	jumlah	Peningkatan Jumlah PS	Jumlah PIK Aktif	
2	Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	jumlah	Peningkatan Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	Jumlah Akseptor KB Jumlah pasangan usia suburx100%	
3	Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	jumlah	Jumlah Kelompok Tribina Aktif dan UPPKS Aktif	Cukup Jelas	



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	365231
2	Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	74
3	Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	90

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2018, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Adanya perlindungan	Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	jumlah	-	-	-	75	74



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

	hak-hak reproduksi dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan								
		.Meningkatnya Cakupan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	%	-	-	-	100	100
2	Meningkatnya perencanaan keluarga melalui pengaturan kelahiran	Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	jumlah	-	-	-	-	365231
3	Tergalinya potensi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	jumlah	-	-	-	-	90

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	jumlah	Peningkatan Jumlah PS	Jumlah PIK Aktif	DPPKB	
2	.Meningkatnya Cakupan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	%			DPPKB	
3	Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	jumlah	Peningkatan Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	Jumlah Akseptor KB Jumlah pasangan usia suburx100%	DPPKB	
4	Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	jumlah	Jumlah Kelompok Tribina Aktif dan UPPKS Aktif		DPPKB	



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Dppkb dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	jumlah	74
2	Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	jumlah	365231
3	Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	jumlah	90



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan



Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	jumlah	365231	365236	100
2	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	jumlah	74	74	100
3	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	jumlah	90	90	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif, dengan capaian kinerja 0 %, pada indikator Jumlah PIK Remaja yg Aktif, dengan capaian kinerja 0 %, pada indikator Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif, dengan capaian kinerja 0 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis



Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	jumlah	365231	365236	100
2	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	jumlah	74	74	100
3	Cakupan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100.00
4	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	jumlah	90	90	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %



2	Sesuai Target	25.00 %
3	Tidak Mencapai Target	75.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	100	1	100	0	0
2	Misi 2	2	2	100	2	100	0	0
3	Misi 3	1	1	100	1	100	0	0
	Jumlah	4	4	100	4	100	0	0

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %
B.	Misi 2	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %



2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	50.00 %
C.	Misi 3	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?**Analisis Pencapaian Sasaran 1****Meningkatnya.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	jumlah			0.00			0.00			0.00			0.00	365231	365065	0.00

Sasaran Meningkatkan.Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif" adalah sebesar 365065 dari target sebesar 365231 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif" tahun ini meningkat 0.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif" tahun ini adalah sebesar



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 99.95 %.



Sasaran 2

Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah PIK Remaja yg Aktif	jumlah			0.00			0.00			0.00	75	75	100.00	74	72	0.00

Sasaran Meningkatnya kelompok PIK Remaja yang aktif dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah PIK Remaja yg Aktif" adalah sebesar 72 dari target sebesar 74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah PIK Remaja yg Aktif" tahun ini menurun 100.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah PIK Remaja yg Aktif" tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 97.30 %.



Sasaran 3

.Meningkatnya Cakupan Administrasi Perkantoran

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 3

.Meningkatnya Cakupan Administrasi Perkantoran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Cakupan Administrasi Perkantoran	%			0.00			0.00			0.00	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran .Meningkatnya Cakupan Administrasi Perkantoran dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Administrasi Perkantoran" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Administrasi Perkantoran" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.



Sasaran 4

Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif	jumlah			0.00			0.00			0.00			0.00	90	90	100

Sasaran Meningkatkan Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS Yang Aktif dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif" adalah sebesar 85 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun



2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif" tahun ini meningkat 1.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 1.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Jumlah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan UPPKS yang aktif" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 94.44 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.95 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97.30 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94.44 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam rangka



mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.816.153.284 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.141.447.792, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 10.674.705.492

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung 2014-2018 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.95 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97.30 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94.44 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.816.153.284 (dua belas milyar delapan ratus enam belas juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah 16.71 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Desember 2018

Kepala,

**Dinas Pengendalian Penduduk dan
Kelurga Berencana Kota Bandung**

Drs.H. Eddy Marwoto, M.Si

NIP. 19680317 198910 1 001